

Determinan kesenjangan kemiskinan desa-kota di Indonesia

Dominicus Savio Priyarsono¹, Miryam Bellina Lilian Sri Kurniawati Wijaya², Ely Elprida Sigiro³

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor, Indonesia

^{2,3}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Email & HP koresponden: priyarsono@apps.ipb.ac.id, 08111198799

Submit : 2023-01-04 Direvisi: 2023-01-10 Accepted: 2023-06-27

©2023 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

Abstrak. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi beberapa faktor yang diperkirakan menentukan kesenjangan kemiskinan desa-kota di Indonesia. Data antar-provinsi tahun 2000-2020 dianalisis dengan teknik regresi data panel. Kesenjangan kemiskinan desa-kota (variabel dependen) diukur dengan dua cara, yakni selisih dan rasio angka kemiskinan desa-kota. Variabel-variabel independen yang dianalisis adalah produk domestik regional bruto per kapita, produktivitas sektor pertanian, transformasi perdesaan, indeks kapasitas fiskal, dan rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk perdesaan. Kedua model itu memberikan hasil estimasi tanda parameter yang konsisten searah. Variabel independen yang secara signifikan berbanding terbalik dengan kedua variabel dependen adalah produktivitas sektor pertanian dan rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk perdesaan, sedangkan yang berbanding lurus adalah PDRB/Kapita dan indeks kapasitas fiskal. Dengan kata lain, dua variabel independen yang pertama itu mengurangi angka kemiskinan perdesaan sedemikian efektif sehingga mampu memperkecil kesenjangan kemiskinan desa-kota. Kebijakan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal daerah terbukti mengurangi kemiskinan di kota lebih efektif daripada di desa, akibatnya justru berdampak memperlebar kesenjangan tersebut. Temuan lain menunjukkan bahwa transformasi perdesaan yang diukur dengan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan di perdesaan, sehingga tidak berdampak signifikan pada kesenjangan kemiskinan desa-kota.

Kata kunci: kesenjangan kemiskinan desa-kota; pertumbuhan; transformasi perdesaan; pendidikan; kapasitas fiskal

Abstract. This article analyzes some factors which might have determined rural-urban poverty gap in Indonesia. Provincial data for the years of 2000-2020 are analyzed by using panel data regression techniques. The gap between rural-urban poverty rates (dependent variable) is measured by two methods, i.e. rural-urban poverty difference and ratio. Gross regional product per capita, agriculture sector productivity, rural transformation, fiscal capacity index, and rural mean years of schooling are regressed on each of the gap measures. The two models give consistently equivalent signs of the estimated parameters. The independent variables that negatively and significantly affect the dependent variables are productivity of agriculture sector and rural mean years of schooling, whereas those that are positive and significant are GDP/Capita and fiscal capacity index. In other words, the first two independent variables decrease the rural poverty rates so effectively that they can reduce the rural-urban poverty gap. Economic growth policy and regional fiscal policy decrease poverty more effectively in urban than they do in rural areas, and hence they widen the poverty gap. Another finding shows that rural transformation that is measured by non-agriculture employment in rural areas is not so effective to reduce rural poverty, that it does not significantly effect on the poverty gap.

Keywords: rural-urban poverty gap; growth; rural transformation; education; fiscal capacity

PENDAHULUAN

Indonesia sudah termasuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas (*upper-middle income country*), namun persoalan kemiskinan di negara ini masih belum terselesaikan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskinnya masih lebih besar dari 25 juta (lebih dari sembilan persen). Menurut Sumarto (2022), sampai dengan masa pandemi COVID-19, pengurangan angka kemiskinan di Indonesia mengesankan dan terutama dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan perluasan program-program perlindungan sosial. Namun, kemajuan itu menjadi mendatar setelah adanya pandemi tersebut (Gambar 1). Pada tahun 1984, sekitar 70 persen penduduk Indonesia (sekitar 110 juta orang) tergolong miskin ekstrem. Angka itu pada tahun 2020 menjadi sekitar sembilan persen dan cenderung tidak berubah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

Di Indonesia kebanyakan orang miskin tinggal di perdesaan (Tabel 1). Fenomena kesenjangan angka kemiskinan desa-kota ini menarik untuk dikaji, karena antara lain mencerminkan dinamika pembangunan wilayah, khususnya yang terkait dengan ketimpangan antarwilayah.

Fakta bahwa selisih dan rasio angka-angka kemiskinan desa-kota itu mengecil dapat menjadi pertanda (indikator) bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan kota cenderung berkurang. Namun demikian, dalam kurun sepuluh tahun menjelang pandemi COVID-19 ternyata laju selisih dan rasio itu cenderung tidak banyak berubah atau stagnan (Priyarsono & Sutomo, 2021).

Di lain pihak, ada niat Presiden Joko Widodo untuk “Membangun dari Pinggiran” (Priyarsono, 2017). Program dana desa pada periode 2015-2019 memperoleh anggaran sebesar Rp 257 triliun dan pada periode 2019-2024 ditargetkan

memperoleh anggaran sebesar Rp 400 triliun (Kompas, 26 Februari 2019, <https://nasional.kompas.com/>), atau secara rata-rata dalam kurun sepuluh tahun tersebut sekitar Rp 63 triliun per tahun atau sekitar 2.32 persen dari total belanja dalam APBN sebesar Rp 2714 triliun pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, <https://djpb.kemenkeu.go.id/>).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada kesenjangan kemiskinan desa-kota. Kesenjangan itu diukur dengan dua metode, yakni berdasarkan selisih angka kemiskinan desa-kota dan berdasarkan rasio (nisbah) antara angka kemiskinan desa-kota.

Analisis kesenjangan kemiskinan desa-kota memberikan manfaat tambahan yang tidak akan diperoleh dari analisis kemiskinan desa dan kemiskinan kota secara terpisah. Manfaat tambahan itu terkait dengan pertanyaan apakah “kue” hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh penduduk miskin perdesaan atau perkotaan. Mengacu pada kebijakan afirmatif “Membangun dari Pinggiran”, laju penurunan angka kemiskinan di perdesaan semestinya lebih pesat daripada laju penurunan angka kemiskinan di perkotaan. Semakin pesat laju penurunan kesenjangan itu semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kebijakan afirmatif tersebut. Bila hal itu terjadi, maka semestinya di Indonesia ada penurunan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota, sehingga hipotesis tentang kebijakan publik yang lebih memihak pembangunan perkotaan (*urban bias*) secara empirik tidak didukung (Lipton, 1977; Bates, 1981).

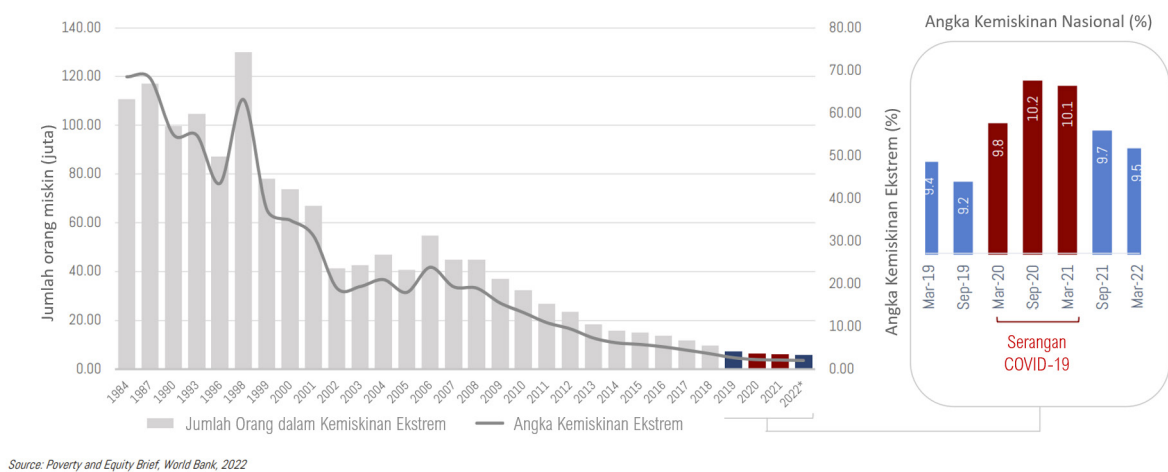
Peningkatan produktivitas yang bisa diukur dengan produk domestik bruto per kapita, atau produk domestik regional bruto per kapita (*PDRB/kapita*) untuk level regional, merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pengurangan angka kemiskinan. Pengalaman Tiongkok dan beberapa negara lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dapat secara efektif menurunkan angka kemiskinan (Rozelle *et al.*, 2000; Sumarto, 2022), baik di perdesaan maupun di perkotaan. Namun harus diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dapat efektif menurunkan angka kemiskinan hanya jika bersifat inklusif, yakni disertai pemerataan pendapatan dan tidak justru menimbulkan ketimpangan.

Dalam hipotesis Kuznets (1955) disebutkan bahwa hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan membentuk kurva U-terbalik. Ketimpangan dalam hipotesis itu berlaku juga untuk perspektif spasial (antarwilayah), sebagaimana dibahas oleh Williamson (1965), dan ditunjukkan secara empiris untuk kasus Tiongkok oleh Lu (2002) dan Ohnisi (2007). Pada dekade 1990an, ketimpangan konsumsi desa-kota cenderung meningkat, namun pada paruh kedua dekade itu laju ketimpangan itu melambat. Secara lebih spesifik, Lu (2002) menyimpulkan bahwa di sebagian besar wilayah Tiongkok titik puncak ketimpangan telah terlewati, sehingga peningkatan konsumsi sudah dibarengi dengan penurunan ketimpangan. Bukti empiris menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Tiongkok yang mempunyai PDRB per kapita tinggi cenderung mempunyai persebaran konsumsi desa-kota yang lebih merata.

Berdasarkan pengalaman banyak negara yang telah sukses mencapai pendapatan rata-rata tinggi, sebuah perekonomian perlu mengupayakan terjadinya transformasi struktural. Teori tentang transformasi struktural (Beylis *et al.*, 2020; Kim *et al.*, 2019; Sumner, 2017; Herrendorf, 2013) menjelaskan mekanisme peningkatan pendapatan rata-rata melalui pergeseran alokasi sumber daya (antara lain tenaga kerja) dari sektor pertanian ke sektor yang lebih produktif, yakni industri, dan kemudian ke sektor jasa.

Untuk mengurangi angka kemiskinan di desa, di dalam sektor pertanian sendiri perlu terjadi *agricultural trasformation*, yakni peningkatan **produktivitas sektor pertanian** melalui pergeseran kegiatan produktif dari subsektor subsisten (misalnya subsektor tanaman pangan) ke subsektor yang menghasilkan *output* bernilai tinggi (Boettiger *et al.* 2017a, 2017b; Laborde, 2019).

Hasil berbagai studi empiris mendukung teori tentang adanya hubungan positif antara pertumbuhan produktivitas sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan (Warr & Suphannachart, 2020; Schneider & Gugerty, 2011). Dengan pertimbangan itu, dapat dihipotesiskan bahwa provinsi-provinsi (dan tahun-tahun) dengan produktivitas perdesaan yang lebih tinggi cenderung mempunyai kesenjangan angka kemiskinan desa-kota yang lebih rendah. Dengan kata lain, produktivitas sektor pertanian berbanding terbalik dengan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota.



Source: Poverty and Equity Brief, World Bank, 2022

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Indonesia 1984-2022.
Sumber: Sumarto (2022)

Rural transformation (transformasi perdesaan) adalah gejala yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan *off-farm* atau kesempatan kerja di luar usahatani di perdesaan. Kebijakan yang mendorong terjadinya *rural transformation* perlu dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa, karena subsistem usahatani lazimnya menghasilkan proporsi nilai tambah terkecil di antara subsistem-subsistem lainnya dalam sebuah sistem agribisnis (Harianto, 2023; Medina, 2022; Davis & Goldberg, 1957). Di negara-negara maju, proses diversifikasi kesempatan kerja di perdesaan dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian menuju ke sektor-sektor industri dan jasa telah menghasilkan pertumbuhan yang pesat baik dalam hal produktivitas maupun pendapatan.

Untuk kasus di Indonesia, transformasi perdesaan yang ditandai dengan pergeseran lapangan kerja tersebut dapat diandaikan terjadi oleh karena munculnya kesempatan kerja sektor manufaktur (yang lebih produktif daripada sektor pertanian) di perdesaan. Di pihak lain, proses mekanisasi pertanian secara umum menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di perdesaan. Jika proses tersebut secara signifikan melibatkan penduduk di bawah garis kemiskinan di perdesaan, maka angka kemiskinan di wilayah itu dapat menurun seiring dengan transformasi tersebut. Namun, jika transformasi perdesaan itu ternyata hanya melibatkan lapisan atas penduduk perdesaan, maka dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan di perdesaan tidak akan signifikan.

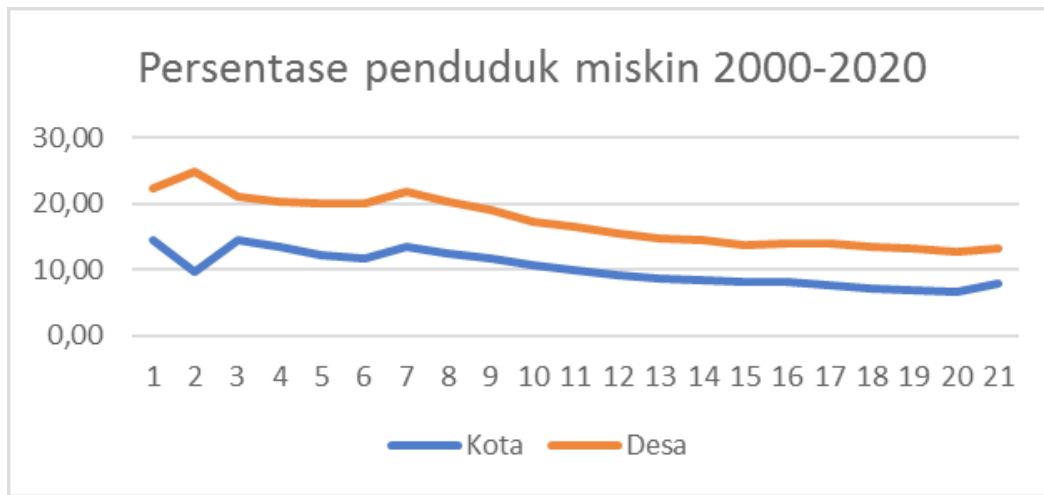
Kapasitas fiskal adalah ukuran kemampuan suatu daerah dalam mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2016 disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, semakin tinggi kapasitas fiskal semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerahnya.

Persoalannya, jika program-program pengurangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara relatif lebih banyak diarahkan ke perdesaan, maka kesenjangan angka kemiskinan desa-kota dapat berkurang; jika tidak, maka kesenjangan itu tidak terpengaruh atau justru makin memburuk. Studi Lisna *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana *headcount index* pertanian turun lebih besar dibandingkan *headcount index* industri dan perdagangan.

Tabel 1. Selisih dan Rasio Angka Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan 2000-2020

Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Selisih (Desa - Kota)	Rasio (Desa / Kota)
	Kota	Desa		
2000	14.6	22.38	7.78	1.53
2001	9.79	24.84	15.05	2.54
2002	14.46	21.1	6.64	1.46
2003	13.57	20.23	6.66	1.49
2004	12.13	20.11	7.98	1.66
2005	11.68	19.98	8.3	1.71
2006	13.47	21.81	8.34	1.62
2007	12.52	20.37	7.85	1.63
2008	11.65	18.93	7.28	1.62
2009	10.72	17.35	6.63	1.62
2010	9.87	16.56	6.69	1.68
2011	9.09	15.59	6.5	1.72
2012	8.6	14.7	6.1	1.71
2013	8.52	14.42	5.9	1.69
2014	8.16	13.76	5.6	1.69
2015	8.22	14.09	5.87	1.71
2016	7.73	13.96	6.23	1.81
2017	7.26	13.47	6.21	1.86
2018	6.89	13.1	6.21	1.90
2019	6.56	12.6	6.04	1.92
2020	7.88	13.2	5.32	1.68

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.



Sumber: BPS, diolah. Sumbu tegak: persentase penduduk miskin. Sumbu datar: tahun.

Gambar 2. Angka Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia (2000-2020).

Berbagai studi menyimpulkan adanya hubungan erat berbanding terbalik antara *tingkat pendidikan* dan insiden kemiskinan, baik di negara-negara miskin, berkembang, maupun maju. Misalnya, Awan *et al.* (2011) melaporkan hasil studi mereka untuk kasus Pakistan. Simpulan serupa dilaporkan pula oleh Mihai *et al.* (2015) dan Hofmarcher (2021) untuk kasus negara-negara Eropa. Walaupun secara empirik tidak ada keraguan tentang keamatan hubungan di antara kedua variabel itu, penjelasan tentang hubungan sebab-akibat di antara kedua variabel itu ternyata cukup beragam (Raffo *et al.*, 2007).

Pendidikan secara umum dalam jangka panjang menaikkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia berpotensi meningkatkan produktivitas. Jika upaya pembangunan pendidikan di perdesaan dinikmati juga oleh penduduk di bawah garis kemiskinan, maka produktivitas mereka meningkat seiring dengan peningkatan rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk perdesaan.

Berdasarkan teori-teori pembangunan ekonomi dan hasil studi-studi empiris terdahulu yang telah diuraikan di atas, dipilih lima variabel independen yang diduga merupakan faktor-faktor penentu kesenjangan, yakni (1) PDRB/Kapita, (2) produktivitas sektor pertanian, (3) transformasi perdesaan, (4) indeks kapasitas fiskal, dan (5) tingkat pendidikan yang diwakili oleh rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk perdesaan. Hipotesis-hipotesis tentang bentuk hubungan antara lima variabel independen itu dengan variabel dependen, yakni kesenjangan angka kemiskinan desa-kota dapat disusun sebagai berikut.

1. PDRB/kapita menurunkan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota.
2. Produktivitas sektor pertanian menurunkan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota.
3. Transformasi perdesaan menurunkan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota.
4. Kapasitas fiskal menurunkan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota.
5. Pendidikan di perdesaan menurunkan kesenjangan angka kemiskinan desa-kota.

METODE PENELITIAN

Definisi operasional variabel dan sumber data

Unit observasi dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta yang diasumsikan tidak mempunyai wilayah perdesaan. Penetapan provinsi sebagai unit observasi *cross-section* didasari pertimbangan tentang ketersediaan data. Jika unit observasi diperkecil menjadi kabupaten/kota, maka baik data angka kemiskinan perdesaan (*rural poverty*) di kota maupun data angka kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) di kabupaten tidak tersedia. Menurut definisi administratif pemerintahan (UU Nomor 22 Tahun 1999), sebuah kota tidak mempunyai wilayah *rural*; sedangkan sebuah kabupaten hanya punya amat sangat sedikit wilayah *urban* (hanya sekitar kantor bupati). Adapun observasi *time series* dimulai pada tahun 2000 (awal era desentralisasi) dan berakhir pada tahun 2020 (awal masa pandemi).

Kemiskinan diukur dengan angka kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah pada tahun tertentu dengan mengikuti definisi yang digunakan oleh BPS. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesenjangan kemiskinan desa-kota yang didefinisikan dengan dua pengukuran sebagai berikut.

- Kesenjangan kemiskinan desa-kota diukur dengan *selisih* angka kemiskinan desa-kota (Y_1).
- Kesenjangan kemiskinan desa-kota diukur dengan *rasio* angka kemiskinan desa-kota (Y_2).

Secara teoretis matematis, nilai Y_1 dan Y_2 berupa bilangan nyata dengan kisaran $(-\infty, \infty)$. Nilai Y_2 dapat menjadi tak terdefinisi jika angka kemiskinan kota bernilai 0. Namun secara empirik seluruh data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tiap unit observasi tidak ada angka kemiskinan yang bernilai 0 dan angka kemiskinan desa selalu lebih besar daripada angka kemiskinan kota. Dengan demikian nilai-nilai Y_1 dan Y_2 dalam penelitian ini berupa bilangan positif dan berbanding lurus satu dengan lainnya.

Adapun variabel-variabel independen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut.

- PDRB/kapita (X_1) diukur dengan mengikuti definisi yang ditetapkan oleh BPS.

- Produktivitas sektor pertanian (X_2) diukur dengan PDRB sektor pertanian dibagi dengan angkatan kerja sektor pertanian.
- Transformasi perdesaan (X_3) kesempatan kerja sektor non-pertanian di perdesaan dibagi dengan total kesempatan kerja di perdesaan.
- Kapasitas fiskal (X_4) diukur dengan indeks kapasitas fiskal sesuai dengan yang didefinisikan oleh Kementerian Keuangan.
- Pendidikan di perdesaan (X_5) diukur dengan rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk perdesaan.
- Selisih dan rasio angka kemiskinan desa-kota tahun sebelumnya, $Y_{1i(t-1)}$ dan $Y_{2i(t-1)}$, diperlakukan sebagai variabel independen, berturut-turut untuk Model I dan Model II, untuk mencerminkan fenomena *time lag*. Dengan kata lain, kedua variabel itu diasumsikan mampu mewakili berbagai variabel independen yang berlangsungnya pada periode $t-1$ namun pengaruhnya baru mawujud pada variabel-variabel dependen pada periode t . Dengan adanya variabel independen ini jumlah tahun yang dianalisis berkurang satu tahun.

Data untuk variabel X_4 bersumber dari Kementerian Keuangan, sedangkan data untuk variabel-variabel lainnya bersumber dari BPS.

Analisis ekonometrik

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ekonometrik data panel (Baltagi, 2021), dengan provinsi sebagai unit observasi *cross-section* ($i = 1, 2, \dots, 33$) dan tahun 2000-2020 sebagai unit observasi *time series* ($t = 1, 2, \dots, 21$).

Dengan unit observasi *cross-section* dan *time series* seperti tersebut di atas, maka persamaan-persamaan regresi untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Model I: } Y_{1it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 Y_{1i(t-1)} + \epsilon_{it} \tag{1}$$

$$\text{Model II: } Y_{2it} = b_0 + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + b_3 X_{3it} + b_4 X_{4it} + b_5 X_{5it} + b_6 Y_{2i(t-1)} + e_{it} \tag{2}$$

Dalam hal ini, β dan b adalah koefisien-koefisien regresi pada kedua persamaan tersebut yang akan diestimasi berdasarkan keseluruhan data, sedangkan ϵ dan e adalah sisaan (*residual*), dengan i dan t berturut-turut adalah indeks untuk provinsi ($i = 1, 2, \dots, 33$) dan tahun ($t = 1, 2, \dots, 21$) sebagaimana sudah didefinisikan pada paragraf terdahulu.

Model I dan II berpotensi menghasilkan simpulan yang tidak searah, khususnya dalam hal tanda (plus atau minus) dan signifikansi nilai koefisien (estimasi parameter) pada persamaan regresi. Perbedaan hasil estimasi di antara kedua model itu dapat terjadi karena tiap model secara empirik mempunyai sensitivitas yang berbeda terhadap keragaman nilai variabel-variabel independen yang dianalisis. Sehubungan dengan hal itu perlu disiapkan prosedur penarikan kesimpulan seperti yang diuraikan pada Tabel 2. Keputusan kategori A (sangat meyakinkan) adalah keputusan yang terkonfirmasi oleh kedua model, kategori B (cukup meyakinkan) yakni terkonfirmasi oleh satu model dan tidak ditolak oleh model lainnya, serta kategori C (inkonklusif) yakni tak dapat ditarik kesimpulan karena hasil Model I bertentangan hasil Model II.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelayakan dan kualitas model

Validitas asumsi klasik dalam penelitian ini diuji dengan bantuan bantuan perangkat lunak *Eviews* Versi 10 untuk memeriksa apakah terdapat masalah multikolinearitas, otokolerasi, dan heteroskedastisitas pada data yang dianalisis. Hasil uji-uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model

Tabel 2. Kriteria-kriteria untuk Penarikan Kesimpulan tentang Nilai Koefisien Regresi

		Koefisien pada Model II		
		Positif	Negatif	Insignifikan
Koefisien pada Model I	Signifikan	(A)	(C)	(B)
	Positif	Sangat meyakinkan bernilai positif, terkonfirmasi oleh dua model	Inkonklusif	Cukup meyakinkan bernilai positif, terkonfirmasi oleh satu model
	Negatif	(C)	(A)	(B)
	Insignifikan	(B)	(B)	(A)
	Nol	Cukup meyakinkan bernilai positif, terkonfirmasi oleh satu model	Cukup meyakinkan bernilai negatif, terkonfirmasi oleh satu model	Sangat meyakinkan bernilai nol, terkonfirmasi oleh dua model

yang paling sesuai digunakan untuk menganalisis data adalah *fixed effect model* (FEM) dengan metode estimasi *generalized least square* (Panel EGLS, *cross section weights*). Tabel hasil uji-uji terlampir. Adapun kualitas model yang diwakili oleh nilai R-kuadrat dan taraf signifikansi uji-*t* serta hasil estimasi parameter disajikan pada Tabel 3 dan 4.

Kualitas keputusan

Jika kedua model itu diperbandingkan, maka keputusan bahwa empat variabel independen (Produktivitas Sektor Pertanian, Transformasi Perdesaan, Rata-rata Jumlah Tahun Bersekolah Perdesaan, dan *time lag*) merupakan determinan kesenjangan kemiskinan desa-kota tergolong sangat meyakinkan (keputusan kategori A, berdasarkan klasifikasi pada Tabel 2). Adapun dua variabel lainnya (PDRB/Kapita dan Indeks Kapasitas Fiskal) merupakan determinan kesenjangan kemiskinan desa-kota yang cukup meyakinkan (keputusan kategori B). Tak satu pun dari lima variabel yang dianalisis memberikan hasil yang inkonklusif (kategori C).

Interpretasi atas Perilaku Variabel Dependen Y_1 dan Y_2

Angka kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan terus mengalami penurunan. Y_1 (selisih angka kemiskinan desa-kota) dan Y_2 (nisbah angka kemiskinan desa-kota) berbanding lurus (berkorelasi positif), sehingga sesuai dengan ekspektasi, tanda (positif atau negatif) koefisien pada kedua persamaan regresi juga terlihat sejalan (Tabel 3 dan 4). Walaupun demikian, sensitivitas variabel-variabel dependen itu terhadap perubahan nilai variabel independen berbeda-

beda, sehingga perilaku keduanya dapat saling memperkaya pemahaman tentang hubungan di antara variabel-variabel dependen dan independen.

Apabila sebuah koefisien pada kedua persamaan regresi bernilai positif, maka peningkatan nilai variabel independen (misalnya PDRB/Kapita) dibarengi dengan peningkatan nilai variabel dependen (misalnya selisih angka kemiskinan desa-kota, Y_1). Karena angka kemiskinan secara umum terus menurun sepanjang waktu, maka peningkatan PDRB/Kapita yang dibarengi dengan peningkatan Y_1 dapat ditafsirkan sebagai bermakna bahwa laju penurunan kemiskinan perkotaan lebih pesat daripada laju penurunan kemiskinan di pedesaan. Dengan kata lain, wilayah perkotaan lebih efektif memanfaatkan perbaikan PDRB/Kapita untuk mengurangi angka kemiskinan daripada wilayah perkotaan.

PDRB/Kapita

Pakar pembangunan ekonomi terkemuka Lant Pritchett menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor (*broad-based growth*) adalah sumber terpenting bagi pengurangan kemiskinan (Pritchett, 2020). Berdasarkan 633 observasi atas 141 negara, dengan garis kemiskinan US\$5.50 pendapatan per hari, ia mengemukakan bukti bahwa ada korelasi negatif yang sangat kuat antara PDB/kapita dengan angka kemiskinan. Pesan serupa untuk kasus Indonesia disampaikan oleh Suryadarma & Suryahadi (2007). Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi baik di sektor publik maupun sektor swasta secara signifikan mengurangi angka kemiskinan, dengan elastisitas yang sama besar.

Tabel 3. Koefisien Regresi dan Signifikansi Variabel-variabel Independen (Model I)
Variabel Dependen = Selisih Angka Kemiskinan Desa-Kota. R-Kuadrat = 0.284507.

Variabel	Koefisien	Prob.
PDRB/Kapita	1.83E-05	0.1177
Produktivitas Sektor Pertanian	-1.038462*	0.0707
Transformasi Perdesaan	-0.051609	0.2776
Indeks Kapasitas Fiskal	0.138796	0.7269
Rata-rata Jumlah Tahun Bersekolah Perdesaan	-1.050480***	0.0005
<i>Time lag</i> ($Y_{1i(t-1)}$)	0.291006***	0.0000
Konstanta	19.74945***	0.0006

Taraf signifikansi: *10% (nyata), **5% (amat nyata), ***1% (amat sangat nyata).

Tabel 4. Koefisien Regresi dan Signifikansi Variabel-variabel Independen (Model II)
Variabel Dependen = Rasio Angka Kemiskinan Desa-Kota. R-Kuadrat = 0.357950.

Variabel	Koefisien	Prob.
PDRB/Kapita	6.56E-06***	0.0001
Produktivitas Sektor Pertanian	-0.216158**	0.0144
Transformasi Perdesaan	-0.005227	0.1715
Indeks Kapasitas Fiskal	0.175602***	0.0004
Rata-rata Jumlah Tahun Bersekolah Perdesaan	-0.150538***	0.0001
<i>Time lag</i> ($Y_{2i(t-1)}$)	0.363487***	0.0001
Konstanta	3.565920***	0.0000

Taraf signifikansi: *10% (nyata), **5% (amat nyata), ***1% (amat sangat nyata).

Bertolak dari dalil itu, pertanyaan yang dapat diajukan adalah manakah yang memperoleh pengurangan angka kemiskinan lebih besar (perdesaan atau perkotaan) seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal perkembangan suatu negara dengan pendapatan rendah peningkatan pendapatan per kapita memperburuk ketimpangan, yang dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai ketimpangan antarwilayah desa-kota. Sebaliknya, untuk negara dengan pendapatan tinggi, peningkatan pendapatan per kapita diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan, yang dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai konvergensi kemiskinan desa-kota.

Dalam penelitian ini, di luar ekspektasi awal, ternyata variabel PDRB/Kapita mempunyai koefisien bertanda positif, bahkan amat sangat signifikan pada persamaan regresi dalam Model II. Tafsiran atas temuan ini, mengikuti hipotesis Kuznets, adalah bahwa titik balik ketimpangan belum tercapai. Artinya, dalam kurun waktu 2000-2020, secara rata-rata, di provinsi-provinsi di Indonesia, kenaikan PDRB/Kapita justru diiringi dengan semakin melebarnya kesenjangan kemiskinan desa-kota. Lebih lanjut dapat ditarik implikasinya, yakni bahwa dalam kurun waktu tersebut pembangunan ekonomi (yang antara lain ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita) lebih cepat mengurangi kemiskinan di perkotaan daripada di perdesaan. Dengan kata lain, laju pengurangan kemiskinan perdesaan yang dihasilkan oleh berbagai kebijakan afirmatif (misalnya Program Dana Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan berbagai kebijakan pro-perdesaan lainnya) tidak bisa mengimbangi laju pengurangan kemiskinan di perkotaan.

Produktivitas sektor pertanian

Cukup banyak hasil riset terdahulu yang meliputi banyak negara dengan berbagai metode pendekatan dan bermacam cara pengukuran secara meyakinkan menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian, melalui berbagai jalur keterkaitan dan mekanisme perambatan sebab-akibat, secara signifikan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan riil, memperluas kesempatan kerja, menciptakan efek pengganda, dan menurunkan harga pangan. Di lain pihak, hambatan adopsi teknologi, keterbatasan aset, dan kendala akses ke pasar menghambat kelompok masyarakat termiskin untuk turut menikmati manfaat dari pertumbuhan produktivitas pertanian (Schneider & Gugerty, 2011; Devkota & Upadhyay, 2013; Dzanku, 2015; Ogundipe *et al.*, 2017; Darko *et al.*, 2018; Warr & Suphannachart, 2020; Benfica *et al.*, 2021; Cateia *et al.*, 2021).

Penelitian ini menerapkan cara pandang bukan terhadap pengaruh produktivitas sektor pertanian pada pengurangan angka kemiskinan yang memang secara meyakinkan sudah terbukti, melainkan terhadap pengaruh produktivitas sektor pertanian pada kesenjangan kemiskinan desa-kota. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian ternyata diiringi dengan pengurangan kesenjangan kemiskinan desa-kota, *ceteris paribus*. Artinya, di provinsi-provinsi dengan produktivitas sektor pertanian tinggi, secara rata-rata kesenjangan angka kemiskinan desa-kota lebih kecil daripada di provinsi-provinsi dengan produktivitas sektor pertanian rendah. Hal ini mudah dipahami, karena kegiatan sektor pertanian pada umumnya berlangsung di perdesaan. Kenaikan produktivitas sektor pertanian berimplikasi pada peningkatan rata-rata pendapatan penduduk perdesaan yang berimbas pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Transformasi perdesaan

Kedua model menghasilkan koefisien regresi yang bertanda negatif, yang berarti variabel ini dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan desa-kota, namun ternyata secara statistik tidak signifikan. Dengan demikian patut diduga bahwa perluasan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan belum cukup efektif mengurangi angka kemiskinan di perdesaan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh juga pada pengurangan kesenjangan kemiskinan desa-kota. Padahal beberapa studi dari berbagai negara memberikan bukti bahwa perkembangan sektor non-pertanian di perdesaan dapat mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.

Berdasarkan *unbalanced panel data* dari 44 negara (dengan 129 titik observasi), Imai *et al.* (2017) antara lain menyimpulkan bahwa perkembangan sektor non-pertanian di perdesaan *dalam beberapa kasus* mengurangi angka kemiskinan. Adapun Benfica & Henderson (2021) menemukan bahwa pertumbuhan pangsa kesempatan kerja sektor non-pertanian mengurangi angka kemiskinan di perdesaan khususnya di negara-negara dengan tingkat pembangunan awal yang rendah. Di lain pihak, Suryahadi *et al.* (2009) menemukan bahwa untuk kasus Indonesia pertumbuhan sektor pertanian di perdesaan mengurangi kemiskinan di perdesaan. Implikasinya, cara paling efektif untuk mempercepat pengurangan kemiskinan adalah dengan berfokus pada pertumbuhan sektor pertanian di perdesaan dan sektor jasa di perkotaan. Dalam jangka panjang, fokus itu perlu digeser ke arah sektor jasa.

Studi Imai & Malaeb (2018) tentang kesenjangan pendapatan sektor pertanian dan sektor non-pertanian menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan sektor non-pertanian yang tinggi cenderung memperlebar kesenjangan desa-kota sepanjang waktu, sedangkan pertumbuhan sektor pertanian tidak berkorelasi dengan kesenjangan desa-kota. Jika situasi makroinstitusional rapuh, maka kesenjangan itu cenderung melebar. Di pihak lain, akselerasi pertumbuhan sektor pertanian cenderung mengurangi ketimpangan di perdesaan secara signifikan di sepanjang waktu, sedangkan akselerasi pertumbuhan sektor non-pertanian cenderung meningkatkan ketimpangan di perdesaan secara signifikan.

Kapasitas fiskal

Variabel ini dapat mencerminkan alokasi anggaran pemerintah daerah (APBD provinsi) yang ditujukan bagi pengurangan angka kemiskinan di daerah yang bersangkutan. Kedua model memberikan hasil estimasi bertanda positif pada koefisien variabel tersebut. Namun, pada Model II koefisien positif itu bersifat amat sangat signifikan, sedangkan pada Model I bersifat tidak signifikan. Dengan demikian, mengikuti kriteria pada Tabel 2, variabel ini cukup meyakinkan bernilai positif, walau hanya terkonfirmasi oleh satu model (keputusan kategori B).

Hasil tersebut di atas dapat diinterpretasikan mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah ternyata tidak mengurangi, bahkan menambah lebar, kesenjangan kemiskinan desa-kota. Artinya, kebijakan fiskal daerah dapat menurunkan angka kemiskinan baik di desa maupun di kota, namun ternyata kebijakan itu mengurangi angka kemiskinan perkotaan secara lebih efektif daripada perdesaan.

Pengalaman yang sebaliknya dilaporkan oleh Zeng *et al.* (2021) untuk kasus Tiongkok. Di negara itu pengeluaran pemerintah (anggaran belanja dalam kebijakan fiskal)

berperanan lebih besar dalam menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan peran pembangunan pertanian.

Pendidikan di perdesaan

Hasil analisis ekonometrika dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk perdesaan secara amat sangat signifikan berhasil menurunkan kesenjangan kemiskinan desa-kota. Artinya, secara umum provinsi-provinsi yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi di perdesaan mempunyai kesenjangan kemiskinan desa-kota yang lebih kecil. Dengan kata lain, tingkat pendidikan penduduk perdesaan secara efektif dapat menurunkan angka kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kemiskinan, pendidikan di perdesaan perlu terus dikembangkan. Lagi pula, pendidikan diyakini bukan saja dapat menaikkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup manusia yang merupakan tujuan akhir dari upaya pembangunan (Imai & Malaeb, 2018).

Penjelasan teoretis tentang sumbangan pendidikan pada pengurangan angka kemiskinan dibahas antara lain oleh Michael (2021). Pendidikan yang kontributif terhadap pengurangan angka kemiskinan di perdesaan itu tidak terbatas pada pendidikan formal saja melainkan juga pada pendidikan non-formal (pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan praktis) sebagaimana dilaporkan oleh Faisal *et al.* (2020) untuk kasus Indonesia dan Samuel & Wale-Odunaiya (2021) untuk kasus Nigeria. Bukti empiris serupa yang mendukung pandangan itu antara lain dilaporkan juga oleh Song (2012) dan Arias *et al.* (2016).

Efek *time lag*

Koefisien variabel independen keenam, $Y_{1(t-1)}$ dan $Y_{2(t-1)}$, bertanda positif dan secara statistik bersifat amat sangat signifikan. Artinya, makin besar kesenjangan angka kemiskinan desa-kota tahun lampau, makin besar pula kesenjangan angka kemiskinan desa-kota tahun ini, *ceteris paribus*. Dengan demikian, bila lima variabel-variabel pertama tidak berpengaruh secara efektif, maka ada kecenderungan bahwa konvergensi kemiskinan desa-kota cenderung melambat atau bahkan terjadi divergensi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa produktivitas sektor pertanian dan pendidikan di perdesaan secara efektif telah menurunkan kesenjangan kemiskinan desa-kota. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kedua variabel itu secara efektif telah menurunkan angka kemiskinan di perdesaan Indonesia, sedemikian rupa sehingga kesenjangan kemiskinan desa-kota menyempit dalam kurun waktu 2000-2020.

Sebaliknya, di luar ekspektasi awal, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PDRB/Kapita dan kebijakan kapasitas fiskal daerah tidak berhasil mempersempit kesenjangan kemiskinan desa-kota. Agaknya, kebijakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita serta kebijakan fiskal daerah secara umum lebih berhasil menurunkan angka kemiskinan di perkotaan daripada di perdesaan.

Transformasi perdesaan yang diukur dengan proporsi kesempatan kerja sektor non-pertanian di perdesaan tidak terbukti berpengaruh pada kesenjangan kemiskinan desa-kota. Fakta ini dapat ditafsirkan sebagai belum berhasilnya industrialisasi (pembangunan sektor non-pertanian)

perdesaan dalam mengurangi angka kemiskinan perdesaan secara efektif. Dapat diperkirakan bahwa tenaga kerja perdesaan yang terserap ke dalam sektor non-pertanian di perdesaan tidak tergolong ke dalam kelompok penduduk miskin.

Untuk mempersempit kesenjangan kemiskinan desa-kota, strategi-strategi yang selama ini ternyata efektif adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pembangunan pendidikan di perdesaan. Oleh karena itu, upaya-upaya selama ini yang sejalan dengan strategi-strategi itu perlu terus dikembangkan. Sebagaimana disarankan oleh Masum & Klaus (2018), pembangunan desa-kota perlu dilakukan secara berimbang dengan pendekatan yang lebih konsisten dan terkoordinasi. Walaupun instrumen untuk pengurangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan dapat berbeda, strategi pembangunan perdesaan dan perkotaan perlu disusun secara terintegrasi dan tidak dapat dibahas secara terpisah. Mengikuti saran Kharas *et al.* (2021), integrasi dan konektivitas antara pasar-pasar perdesaan dan perkotaan perlu diupayakan untuk mengurangi arus migrasi ke kota dan bersamaan dengan itu dapat meningkatkan pendapatan di wilayah perdesaan.

Strategi peningkatan pendapatan (PDRB/Kapita) pemerintah pusat yang diterapkan secara sama rata antara desa dan kota berpotensi memperlebar kesenjangan kemiskinan desa-kota. Demikian pula, kebijakan fiskal daerah tampaknya berdampak mengurangi kemiskinan perkotaan secara lebih efektif daripada perdesaan, sehingga memberikan hasil akhir berupa kesenjangan kemiskinan desa-kota yang melebar. Untuk mempersempit kesenjangan itu, efektivitas kebijakan afirmatif yang pro-perdesaan yang selama ini sudah diterapkan perlu ditinjau ulang dan direvisi agar dapat lebih efektif mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.

Pengembangan kegiatan sektor non-pertanian (sektor-sektor sekunder dan tersier) di perdesaan dalam upaya transformasi kesempatan kerja di perdesaan belum secara efektif mampu menurunkan angka kemiskinan. Dapat diperkirakan bahwa penyebab hal itu adalah penguasaan keterampilan yang terbatas yang dimiliki oleh penduduk miskin di perdesaan. Oleh karena itu dapat disarankan bahwa akses terhadap pendidikan (termasuk pendidikan yang bersifat vokasional dan peningkatan keterampilan praktis) bagi para penduduk miskin di perdesaan perlu terus dikembangkan agar supaya sektor-sektor non-pertanian dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin di perdesaan. Bila hal itu terwujud, maka transformasi kesempatan kerja di perdesaan dapat diharapkan bukan saja meningkatkan rata-rata pendapatan, namun juga mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.

Dua temuan penting dari penelitian ini, yakni tentang hubungan antara PDRB/Kapita dan transformasi perekonomian perdesaan dengan kesenjangan kemiskinan desa-kota, dapat ditindaklanjuti untuk studi mendatang. Fokus studi mendatang dapat diarahkan untuk menjelaskan secara lebih rinci sebab-musabab mengapa pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan tidak berdampak atau justru memperlebar kesenjangan angka kemiskinan desa-kota. Pemahaman tentang fenomena tersebut dibutuhkan sebagai landasan bagi kebijakan spasial keterkaitan desa-kota. Di samping itu, dalam kerangka hipotesis kurva Kuznets, untuk studi mendatang perlu juga dikaji keterkaitan antara tingkat pendapatan regional dan kesenjangan tingkat kemajuan desa-kota.

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa observasi belum cukup mengarah ke data perkotaan. Padahal agar diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif yang mampu memberikan rekomendasi tentang kebijakan spasial keterkaitan desa-kota perlu ada pengamatan yang lebih berimbang terhadap data perdesaan maupun perkotaan. Oleh karena itu, untuk studi mendatang dapat disarankan agar observasi terhadap data desa dan kota dilakukan secara lebih berimbang. Untuk meningkatkan kualitas model ekonometrik, pada studi-studi mendatang dapat dilibatkan variabel kendali (misalnya, pengaruh lokasi Jawa versus Luar Jawa, Indonesia Barat versus Indonesia Timur, wilayah dataran tinggi versus wilayah pesisir, dan sebagainya).

UCAPAN TERIMA KASIH

Versi awal artikel ini telah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional *Indonesian Regional Science Association (IRSA)* di Lombok pada tanggal 18-19 Juli 2022. Kepada para peserta konferensi tersebut yang telah memberikan kritik dan saran untuk draf artikel ini disampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih juga disampaikan kepada dua penelaah anonim dari majalah ini yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan artikel ini. Kesalahan yang mungkin masih ada dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulis.

Daftar Pustaka

- Arias, R., Gimenez, G., & Sánchez, L. (2016). *Impact of education on poverty reduction in Costa Rica: A regional and urban-rural analysis*. <https://www.researchgate.net/publication/308172008>
- Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of education on poverty reduction. *International Journal of Academic Research*, 3(1), 660–666. http://content.ebscohost.com.ezproxy1.canberra.edu.au/pdf25_26/pdf/2011/AY08/01Jan11/59737662.pdf?T=P&P=AN&K=59737662&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMMvl7ESeprc40dVUOLCmr0ueprNSrq64SLGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGpFC3qLNMuePfgeyx44Dt6fIA
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6 th). In *Springer*.
- Bates, R. (1981). *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*. 18. University of California Press.
- Benfica, R., & Henderson, H. (2021). The effect of the sectoral composition of economic growth on rural and urban poverty. *Review of Income and Wealth*, 67(1). <https://doi.org/10.1111/roiw.12462>
- Beylis, G., Jaef, R. F., Morris, M., Sebastian, A. R., & Sinha, R. (2020). What is structural transformation?. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1448-8_ch1
- Boettiger, S., Denis, N., & Sanghvi, S. (2017a). Readiness for agricultural transformation. *McKinsey & Company*.
- Boettiger, S., Denis, N., & Sanghvi, S. (2017b). Successful agricultural transformations: Six core elements of planning and delivery. *McKinsey & Company*.
- Cateia, Júlio Vicente; Carvalho, Terciane Sabadini; Bittencourt, M. V. L. (2021). *Does improving agricultural productivity reduce poverty? A computable general equilibrium approach for Guinea-Bissau*. 1–20. <https://www.semanticscholar.org/paper/Does-Improving-Agricultural-Productivity-Reduce-A-Cateia-Carvalho/ac46ccdc78ec56b2ea66729a2c6d35560d5a8e7>
- Chow, G. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605. <http://www.jstor.org/stable/1910133>
- Darko, F. A., Palacios-Lopez, A., Kilic, T., & Ricker-Gilbert, J. (2018). Micro-level welfare impacts of agricultural productivity: Evidence from Rural Malawi. *Journal of Development Studies*, 54(5), 915–932. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1430771>
- Davis, J. H., & Goldberg, R. A. (1957). *A concept of agribusiness*. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University. <https://books.google.co.id/books?id=kpu5AAAAIAAJ>
- Devkota, S., & Upadhyay, M. (2013). Agricultural productivity and poverty reduction in Nepal. *Review of Development Economics*, 17(4). <https://doi.org/10.1111/rode.12062>
- Dzanku, F. M. (2015). Household welfare effects of agricultural productivity: A multidimensional perspective from Ghana. *Journal of Development Studies*, 51(9). <https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1010153>
- Faisal, F., Risal, A., Hardiatio, H., & Elihami, E. (2020). Nonformal education and reduction of poverty in rural areas. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5 th). McGraw-Hill.
- Harianto. (2023, May 27). Dampak perubahan sistem agribisnis terhadap peningkatan kesenjangan ekonomi rumah tangga pertanian dengan non-pertanian. Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor.
- Herrendorf, B., Rogerson, R., & Valentinyi, Á. (2013). Growth and structural transformation. *Handbook of Economic Growth*, 2, 855–941. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53540-5.00006-9>
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102124>
- Imai, K., & Malaeb, B. (2018). Asia's rural-urban disparity in the context of growing inequality. In *Ifad Research Series* (Vol. 27).
- Imai, K. S., Gaiha, R., & Garbero, A. (2017). Poverty reduction during the rural-urban transformation: Rural development is still more important than urbanisation. *Journal of Policy Modeling*, 39(6). <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.10.002>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Peta kapasitas fiskal daerah*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/search>
- Kharas, H., Nucci, C. D., Hamel, K., & Tong, B. (2021). To move the needle on ending extreme poverty, focus on rural area. Retrieved January 23, 2023, from <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/02/21/to-move-the-needle-on-ending-extreme-poverty-focus-on-rural-areas/>
- Kim, K., Sumner, A., & Yusuf, A. A. (2019). Is structural transformation-led economic growth immiserizing or inclusive? The case of Indonesia. *Immiserizing Growth*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198832317.003.0010>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 1. <https://www.jstor.org/stable/1811581>
- Laborde, D., Lallemand, T., Mcdougal, K., & Smaller, C. (2019). Transforming agriculture in africa & asia : what are the policy priorities ?. *International Institute for Sustainable Development & International Food Policy Research Institute*.
- Lipton, M. (1977). *Why poor people stay poor: Urban bias in world development*. Cambridge University Press.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak kapasitas fiskal terhadap penurunan kemiskinan: Suatu analisis simulasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433>
- Lu, D. (2002). Rural-urban income disparity: Impact of growth, allocative efficiency and local growth welfare. *Urbanization and Social Welfare in China*, 13, 255–268. <https://doi.org/10.4324/9781351143523-13>
- Masum, F., & Klaus, M. (2018). *Balancing urban and rural development – how to reach the goal?*. FIG Congress 2018: Embracing our smart world where the continents connect: Enhancing the geospatial maturity of societies Istanbul, Turkey, May 6-11, 2018.

- Medina, G. da S. (2022). The economics of agribusiness in developing countries: areas of opportunities for a new development paradigm in the soybean supply chain in Brazil. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.842338>
- Michael, S. G. (2021). Education is key to sustained poverty reduction in Azerbaijan. Retrieved January 16, 2023, from <https://qazet.az/en/article/education-is-key-to-sustained-poverty-reduction-in-azerbaijan>
- Mihai, M., Țițan, E., & Manea, D. (2015). Education and poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 855–860. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01532-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01532-4)
- Ogundipe, A., Oduntan, E., Ogunniyi, A., & Olagunju, K. (2017). Agricultural productivity, poverty reduction and inclusive growth in Africa: Linkages and pathways. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 18(1). <https://doi.org/10.9734/ajaees/2017/32427>
- Pritchett, L. (2020). Poverty reduction and economic growth. Oxford University. Retrieved January 16, 2023, from <https://econofact.org/poverty-reduction-and-economic-growth>
- Priyarsono, D.S.; Sutomo, S. (2021). Perlambatan konvergensi kemiskinan desa-kota dan kebijakan alternatif untuk pembangunan desa. *Statistical & Policy Brief*, 18, 15–21.
- Priyarsono, D. S. (2017). Membangun dari pinggiran: tinjauan dari perspektif ilmu ekonomi regional. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.42-52>
- Raffo, C., Dyson, D., Gunter, H. M., Hall, D., & others. (2007). Education and poverty: A critical review of theory, policy and practice. University of Manchester.
- Rozelle, S., Huang, J., John, A., Fry, C., Building, G., & Stanford, G. S. (2000). *China's war on poverty* (Working Paper No.60; Issue 60). Center for International Development.
- Samuel, D., & Wale-Odunaiya, E. (2021). Analysis of the impact of education on poverty reduction and economic development in Nigeria. *European Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.7176/ejbm/13-23-03>
- Schneider, K., & Gugerty, P. M. K. (2021). Agricultural productivity and poverty reduction: linkages and pathways. *Evans School Review*, 1(1). <https://doi.org/10.7152/esr.v1i1.12249>
- Song, Y. (2012). Poverty reduction in China: The contribution of popularizing primary education. *China and World Economy*, 20(1). <https://doi.org/10.1111/j.1749-124X.2012.01275.x>
- Sumarto, S. (2022). *Towards 0% extreme poverty in Indonesia: Challenges, policy and solutions to inclusive growth in Indonesia*. Jakarta: TNP2K in Collaboration with IBER National Symposium.
- Sumner, A. (2017). What is structural transformation? global poverty and inequality dynamics. Retrieved June 1, 2023, from <https://gpid.univie.ac.at/2017/11/15/what-is-structural-transformation-and-why-does-it-matter/>
- Suryadarma, Daniel, Suryahadi, A. (2007). *The impact of private sector growth on poverty reduction: evidence from Indonesia* (Working Paper). The SMERU Research Institute.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89(1). <https://doi.org/10.1016/j.jdevec.2008.08.003>
- Warr, P., & Suphannachart, W. (2020). Agricultural productivity growth and poverty reduction: evidence from Thailand. *Journal of Agricultural Economics*, 72(2), 525–546. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12412>
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4, Part 2). <https://doi.org/10.1086/450136>
- Zeng, G., Zhang, C., Li, S., & Sun, H. (2021). The dynamic impact of agricultural fiscal expenditures and gross agricultural output on poverty reduction: A var model analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13115766>